

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Evaluasi perhitungan pajak penghasilan badan Perusahaan Distributor Air Mineral di Surabaya diketahui dari penelaahan terhadap catatan keuangan perusahaan telah mematuhi aturan yang dituangkan dalam Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008. Dimulai dengan memeriksa akun-akun biaya yang masuk dalam laporan laba rugi dimana total biaya sebesar Rp. 1.747.396.851.

Koreksi kelompok fiskal atas laporang keuangan baik itu fiskal negatif maupun positif telah dilakukan terhadap laporan keuangan perusahaan. Dimana koreksi fiskal positif sebesar Rp. 1.747.396.851 sedangkan koreksi fiskal negatif sebesar Rp. 1.782.657.754. dan mendapatkan laba setelah koreksi Fiskal sebesar Rp. 35.260.903. Penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final sebesar Rp. 8.882.603.

Namun ada beberapa hal yang pengakuannya tidak sesuai dengan persyaratan perpajakan, sehingga harus dilakukan perbaikan sesuai dengan SPT perusahaan yang tertera.



5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan penulis terhadap hasil penelitian ini antara lain, yaitu:

Diharapkan perusahaan akan mencermati beberapa akun atau hal-hal yang telah mengalami koreksi fiskal agar laporan keuangan periode mendatang tidak memerlukan penyesuaian tersebut.

Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya tidak hanya meneliti mengenai perhitungan dan evaluasi Pajak Penghasilan Badan tetapi juga melakukan pelaporan dan penyetoran Pajak Penghasilan Badan.

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk penyalinan/saran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.





Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito A dan Setiawan J, S. P. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Jejak. Jakarta.
- Budianti W dan Ana E.O.I. 2016. Implementasi Tax Planning terhadap Perhitungan PPh Badan pada PT Citra Abadi Sejati. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan 2* (1) E-ISSN: 2502-4159
- Kemenkeu. 2022. *APBN Kita 2022*. 1–96.
- Linawati dan Sukarno. 2020. *Praktikum Perpajakan*. L. Rosini (ed.); Issue 1. Putut Said Permana.
- Mamuaya, M. Y. Alexander S.W, Jessy D.L. 2022. Evaluasi Penerapan Pajak Penghasilan Badan Pada Cv . Anugerah Ilmu Porodisa. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 6(1), 1–7.
- Maharani P. K. 2017. *Analisis Penerapan Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Terutang Study Pada PT. XYZ*. Skripsi. Jakarta: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- Manab, A. 2015. *Manajemen Pendidikan*. Kalimedia. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Andi. Yogyakarta.
- _____, 2018 *Perpajakan Edisi Terbaru*, Andi. Yogyakarta.
- Mustaqiem, Dr., SH., M. S. 2015. *Perpajakan Dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia*. Buku Litera. Yogyakarta.
- Natasya, M dan Widjaja, H. 2017. Analisi Pajak Perhitungan Badan Pada PT.Xyz. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Tarumanegara*. Jakarta.
- Online pajak. 2022. *Tarif Pph Badan Terbaru dalam Perhitungan Pajak Badan*. <https://www.online-pajak.com/tentang-efiling/tarif-pph-badan>. (Di akses Tgl. 06 Oktober 2022 : Pk. 00.24)
- Republik Indonesia, Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor Kep-220/PJ./2002 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler Dan Kendaraan Perusahaan.
- Republik Indonesia, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per - 39/Pj/2009 Tentang Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya.



Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007
Tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Dan Penyetoran Pajak,
Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, Dan Tata Cara Pembayaran,
Penyetoran Dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran
Dan Penundaan Pembayaran Pajak.

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007
Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008
Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Resmi S. 2017. *Perpajakan Teori & Kasus*. 10th edn. Salemba Empat. Jakarta.

Rukajat, A. 2018. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Buku. Yogyakarta.

Sari F.P. 2019. *Analisi Laporan Rekonsiliasi Fiskal Pada Laporan Keuangan
Komersial Untuk Menghitung PPh Badan Pada PT. Sarana Agro
Nusantara*. Skripsi. Medan: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah.

Siswanto, E.H dan Tarmidi, D. 2021. *Akuntansi Pajak Teori Dan Praktik*,
Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Depok.

Undang-undang No. 16 Tahun 2009. tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan
Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. Tentang Perubahan
Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak
Penghasilan.

Undang-undang No. 17 Tahun 2000. Tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Undang-undang No. 10 Tahun 1994. Tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah
Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991

Undang-undang No. 6 Tahun 1983. Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983. Tentang Pajak
Penghasilan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik
Indonesia.



Yusuf, S. 2020. “*Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (Pph) Badan Dengan Pph Tidak Final Dan Pph Final Terhadap Pajak Terutang PT. Menara Gading Mulia.*” Cakrawala. Dosen. 1–11.



Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.